



Penguatan Tata Kelola Data dan Optimalisasi Peran Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Agung Indrajit, S.T., M.Sc

Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas



28 November 2023

Disampaikan pada
Forum Satu Data Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Kebijakan Strategis SDI: Berbagipakai Data



01



Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
GNI Per Capita (USD)	5.500	7.400-7.670	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	9,1	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9	28,0

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

02



Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	4,5 - 5,0	0,5-0,8
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,372 - 0,375	0,377-0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	23,3	28,5

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

03



Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	29	15 besar

Sumber: Pareto economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

04



Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,61	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

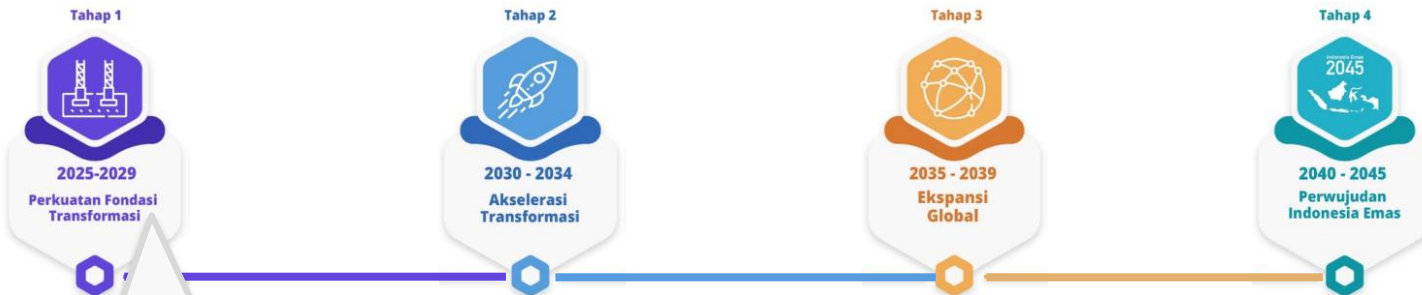
	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37	93,5

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)



Kementerian PPN/
Bappenas

RPJMN Teknokratik 2025-2029 adalah Rancangan Teknokratik Tahap Pertama dari RPJPN 2025-2045



Tahap 1 2025-2029 Perkuatan Fondasi Transformasi

Kisaran pertumbuhan ekonomi
5,6 – 6,1 persen

Middle Class Income
38% populasi



Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan

1. Transformasi Sosial:

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi:

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola:

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, **digitalisasi pelayanan publik**, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan



Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara yang Berdaulat,
Maju dan berkelanjutan



Transformasi Digital Nasional



Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)

Data Pemerintah
Berkualitas dan
Terintegrasi (SDI)

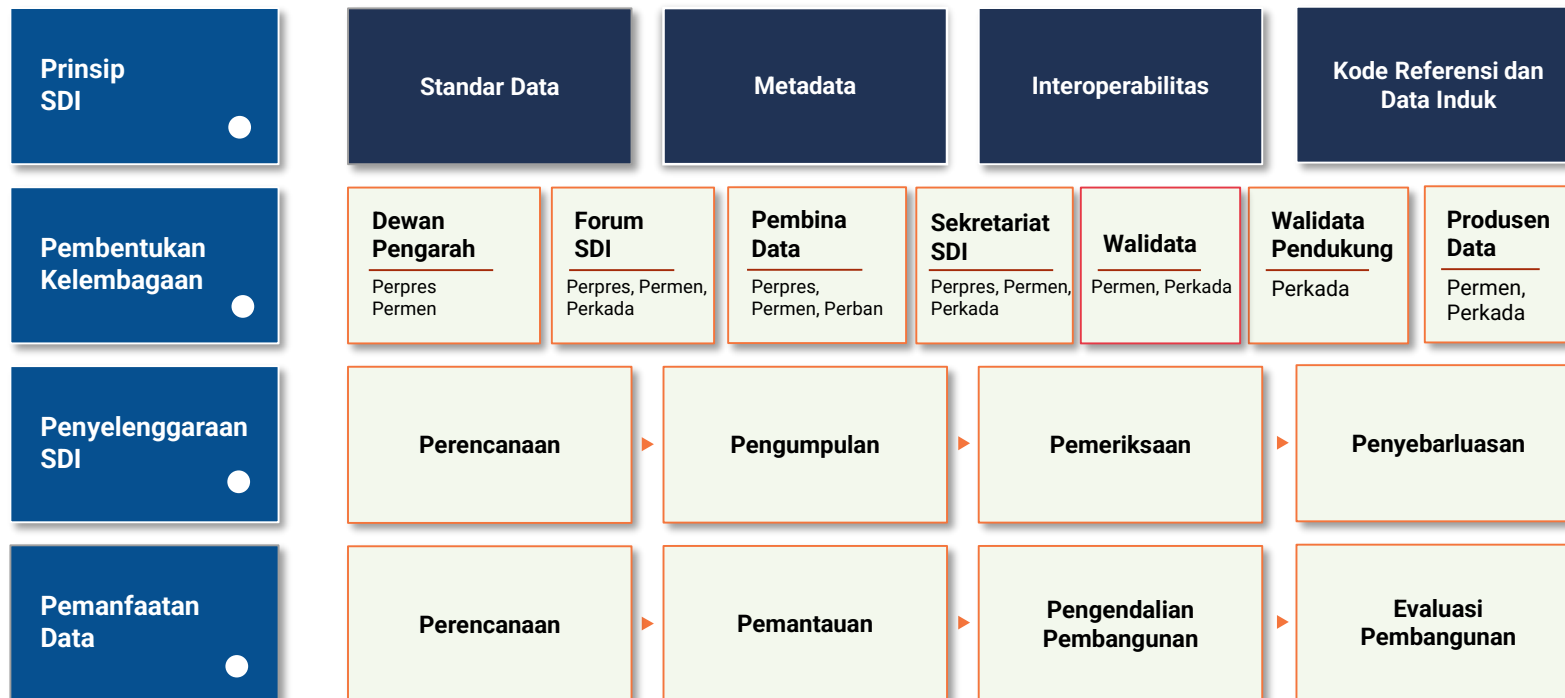


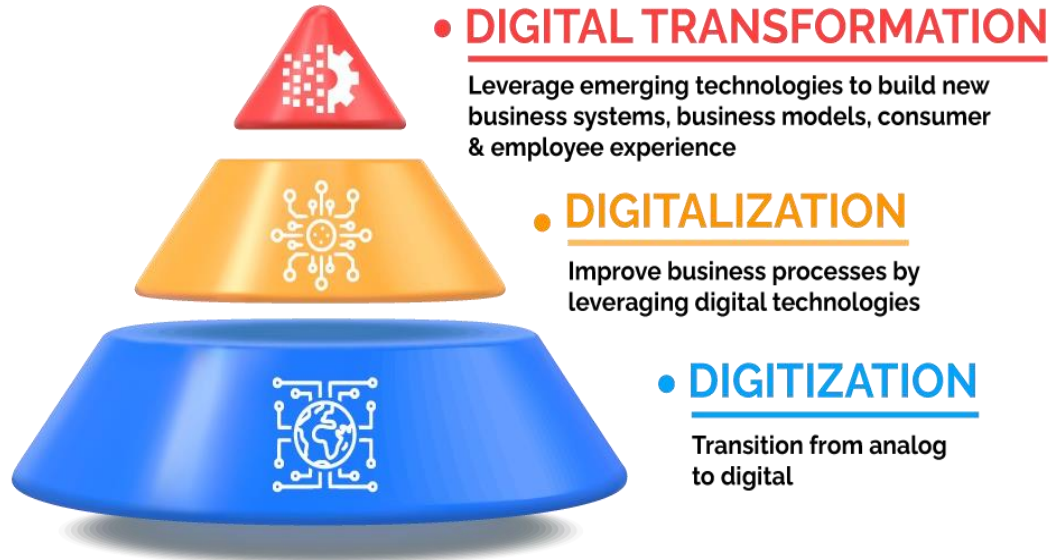
Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah
Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Sasaran





Tahapan menuju Transformasi Digital memerlukan:

- perubahan *mindset* yang berbeda
- melakukan terobosan,
- perubahan proses bisnis

Inisiatif Berdampak: RPerpres Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Fokus Aplikasi SPBE Prioritas diluncurkan di TW 3 2024



Kriteria lainnya:

- Aplikasi dengan anggaran lebih dari 10 Milyar Rupiah/tahun
- Aplikasi memiliki lebih dari 200.000 pengguna

Peran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia sebagai **PLATFORM PERTUKARAN DATA**, sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure.

Dibutuhkan:

1. Regulasi Tata Kelola Pertukaran Data Mentah (*Raw Data*) dan Data Pribadi sebagai Turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
2. Tata Kelola pertukaran data antar Domain Layanan
3. Pengembangan Platform Pertukaran Data yang terintegrasi dengan Layanan Digital Aparatur Negara, Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, SIM Online serta pemanfaatan Data Regsosek.

Poin Kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI 2023



Penyepakatan 1: Penyediaan Platform Pertukaran Data sebagai bagian dari *Digital Public Infrastructure*

1. Regulasi Pertukaran Data Mentah (*Raw Data*) dan Data Individu sebagai tujuanan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi
2. Penetapan Pengampu Data untuk Masing-masing Domain Layanan Digital Nasional dan Data Induk Regsosek
3. Penganggaran Pengembangan dan Operasionalisasi Platform Pertukaran Data untuk Keteipaduan Layanan Digital Nasional
4. Pengembangan Platform dan Tata Kelola Pertukaran Data untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional





Kementerian PPN/
Bappenas

BERSIAP MENUJU PERANKINGAN BARU



SATU DATA
INDONESIA



ASEAN
INDONESIA
2023

Doing Business 2020



WORLD BANK GROUP

Comparing Business
Regulation in
190 Economies

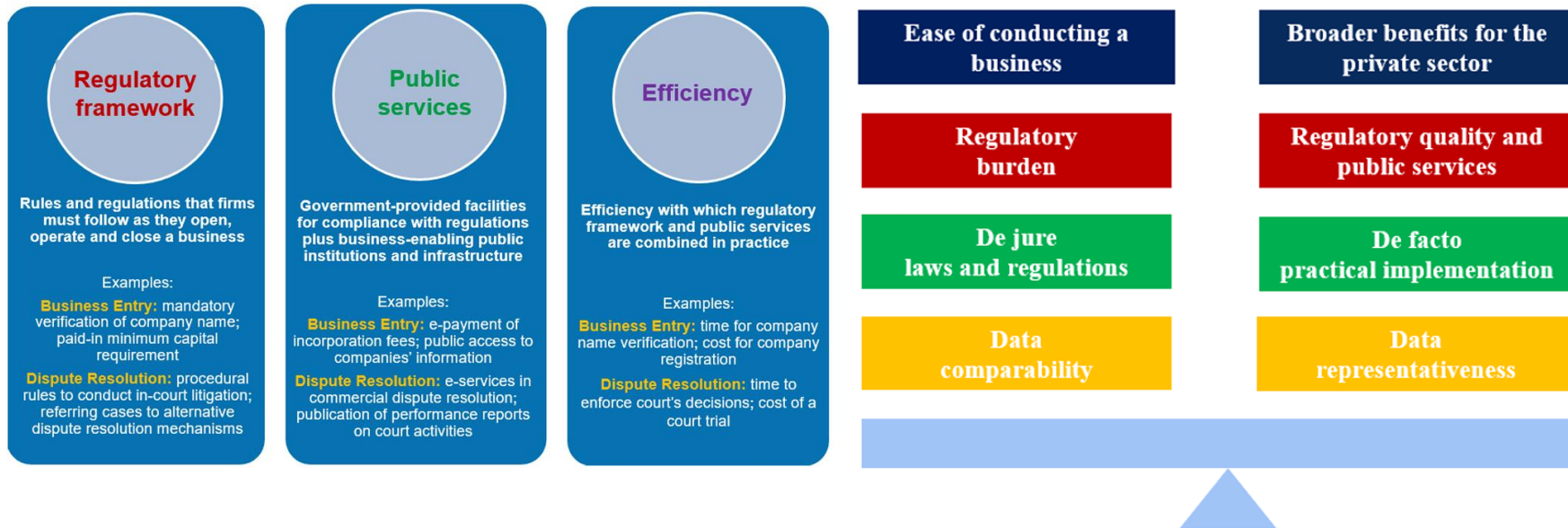


Business Ready (B-READY)

World Bank replaces Ease of
Doing Business with Business
Ready Project



MENUJU KRITERIA B-READY



Source: B-READY team.



MENUJU KRITERIA B-READY

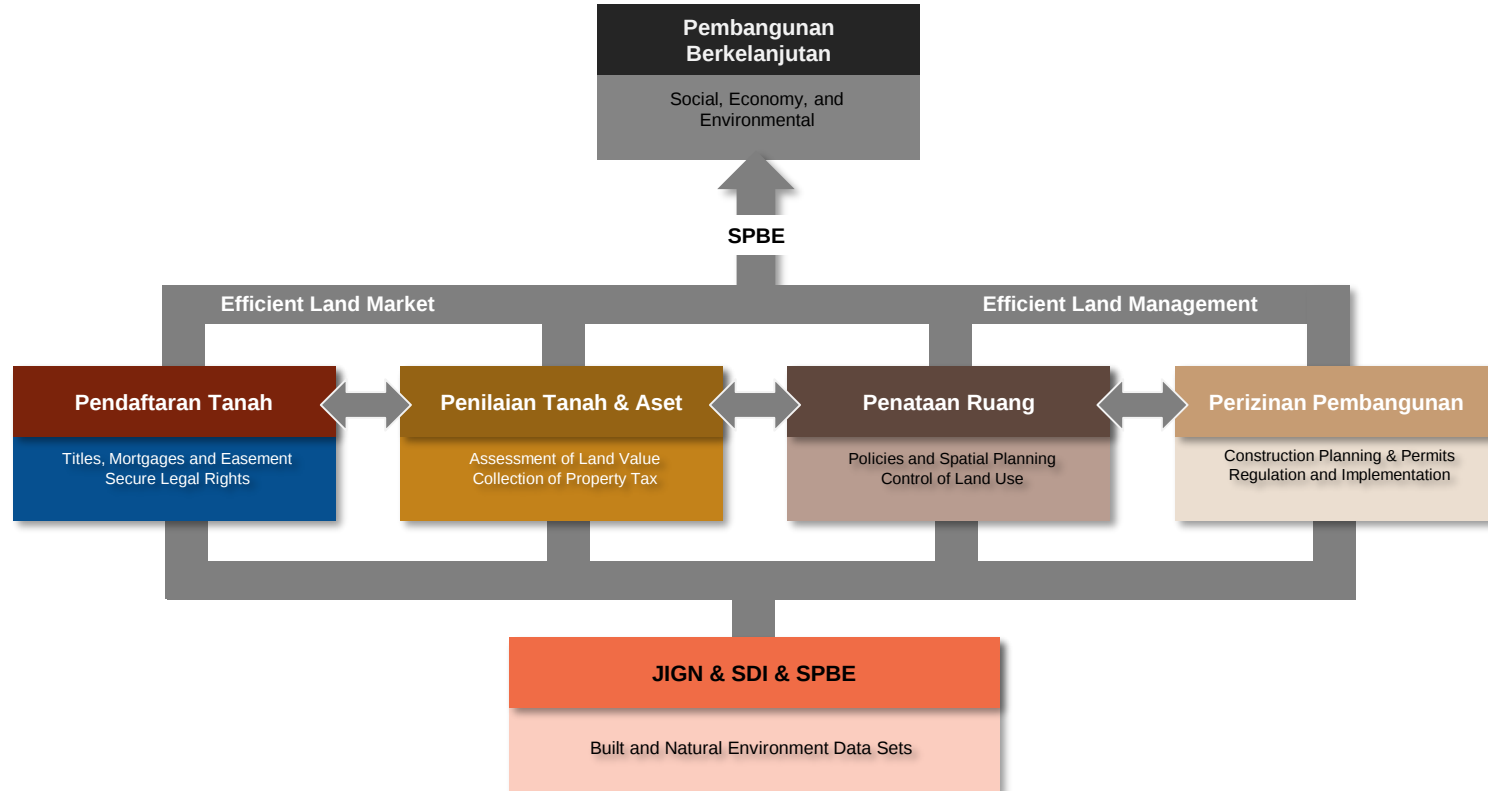


Source: B-READY team.

The selection of topics is guided by the threefold purpose of the B-READY project of advocating for policy reform, informing specific policy advice, and providing data for development policy research. The selection of topics meets the following criteria:

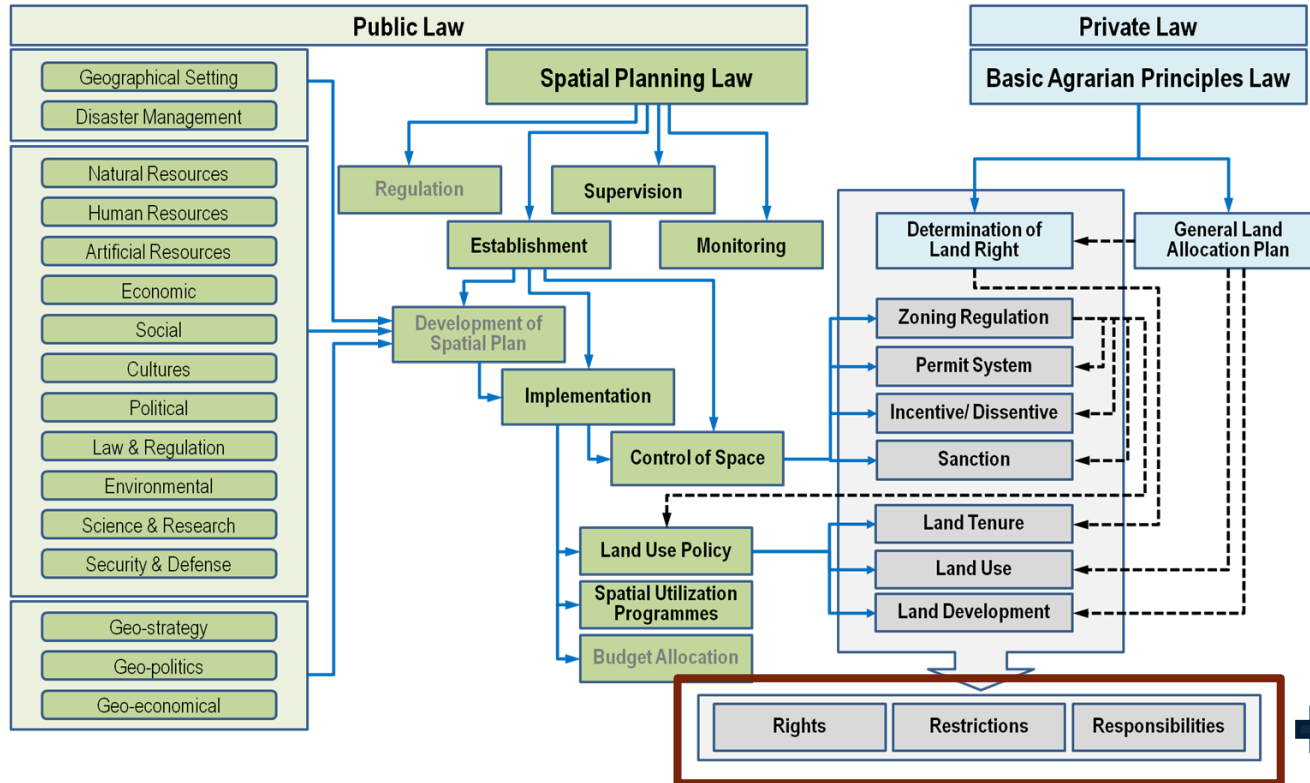


LAND MANAGEMENT PARADIGM: PERIJINAN DALAM RANGKA INVESTASI





PROBIS: DATA ANALYTICS



PP 5/2021
Perijinan Berbasis
Resiko



Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Produsen Data tingkat daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Pasal 33, ayat (3) dan (4)

- (3) Ketentuan terkait **penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah** diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. **penyelenggara** Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. **penyelenggaraan** Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - c. dukungan **anggaran**; dan
 - d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Indonesia.

Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi



Penentuan Daftar Data

- Memenuhi kebutuhan proses bisnis
- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahan Pembina Data

Koordinasi



Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Presiden/Kepala Daerah

Kesepakatan



Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI



Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina data lainnya

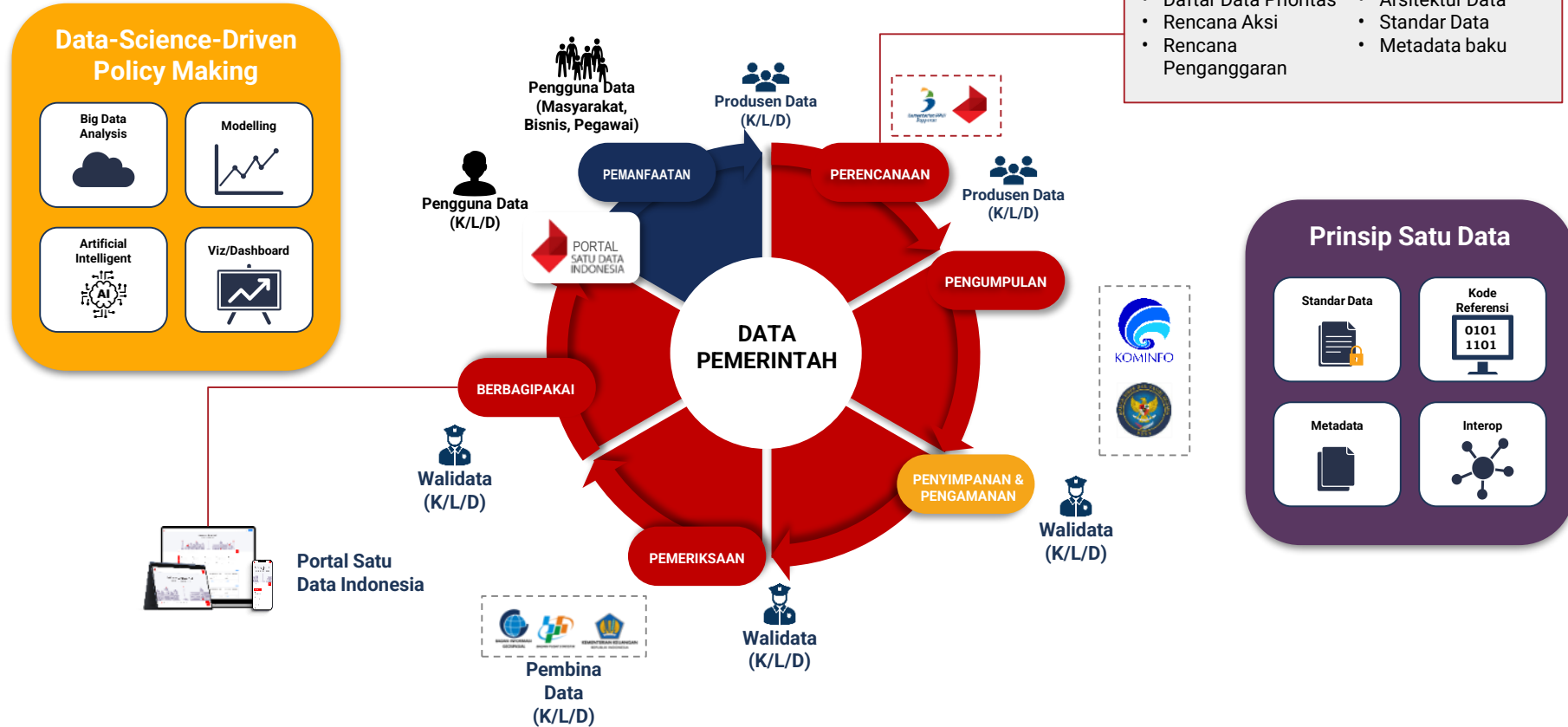


Pembatasan Akses Data Tertentu

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia

Tata Kelola Satu Data Indonesia

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Referensi:

- Prepres 39/2019 ttg SDI;
- PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep 31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan Pokja Forum SDI tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Forum SDI Pusat

Kelompok Kerja Forum SDI tingkat Pusat

Sekretariat SDI tingkat Pusat

Pembina Data tingkat Pusat

Forum SDI Daerah

38 Prov
514 Kab/Kota

Pembina Data tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat Daerah

Walidata Daerah

Walidata Pendukung

Walidata Pendukung

Produsen Data

Produsen Data

Produsen Data

Produsen Data

Forum SDI K/L

83 K/L

Walidata Pusat

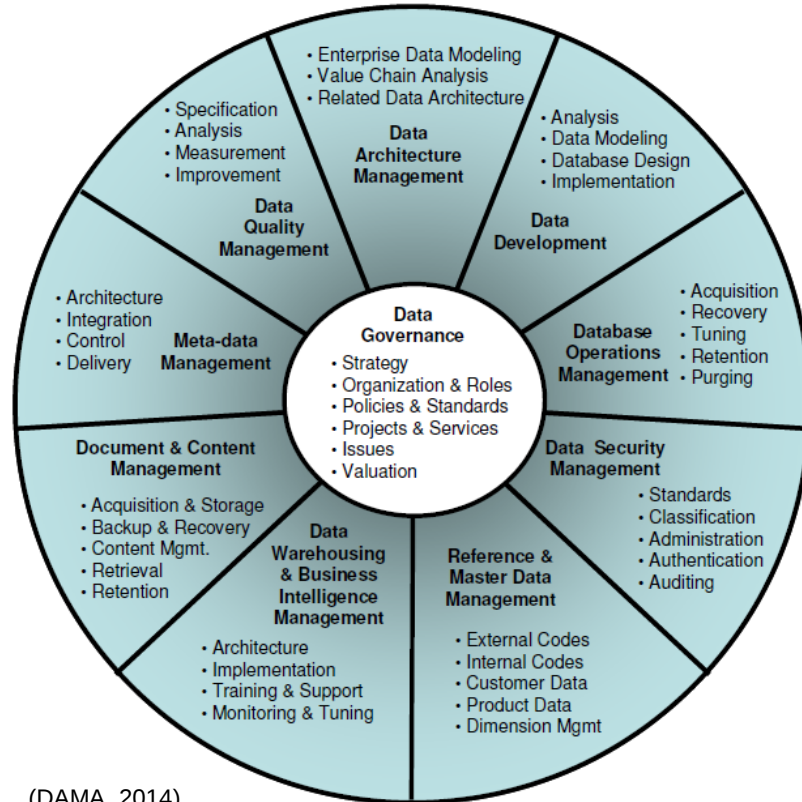
Produsen Data

Produsen Data

Produsen Data

*Forum SDI K/L dibentuk berdasarkan kebutuhan K/L dalam teknis penyelenggaraan SDI tingkat K/L





1. Pengembangan Basisdata
2. Manajemen Arsitektur Data
3. Manajemen Operasional Basisdata
4. Manajemen Metadata
5. Manajemen Keamanan Data
6. Manajemen Data Master/Referensi
7. Manajemen *Data Warehouse & Business Intelligence*
8. Manajemen Dokumen dan Konten
9. Manajemen Kualitas Data

1

Forum Identifikasi Data Tingkat Daerah



Sekretariat SDI tingkat Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Fasilitator Forum SDI tingkat Daerah	Mengidentifikasi Data	Mendukung kegiatan identifikasi data	Mendukung kegiatan identifikasi data

2

Forum Penyepakatan Daftar Data Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Menyepakati Daftar Data yang telah disertai jadwal pemutakhiran	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah	Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

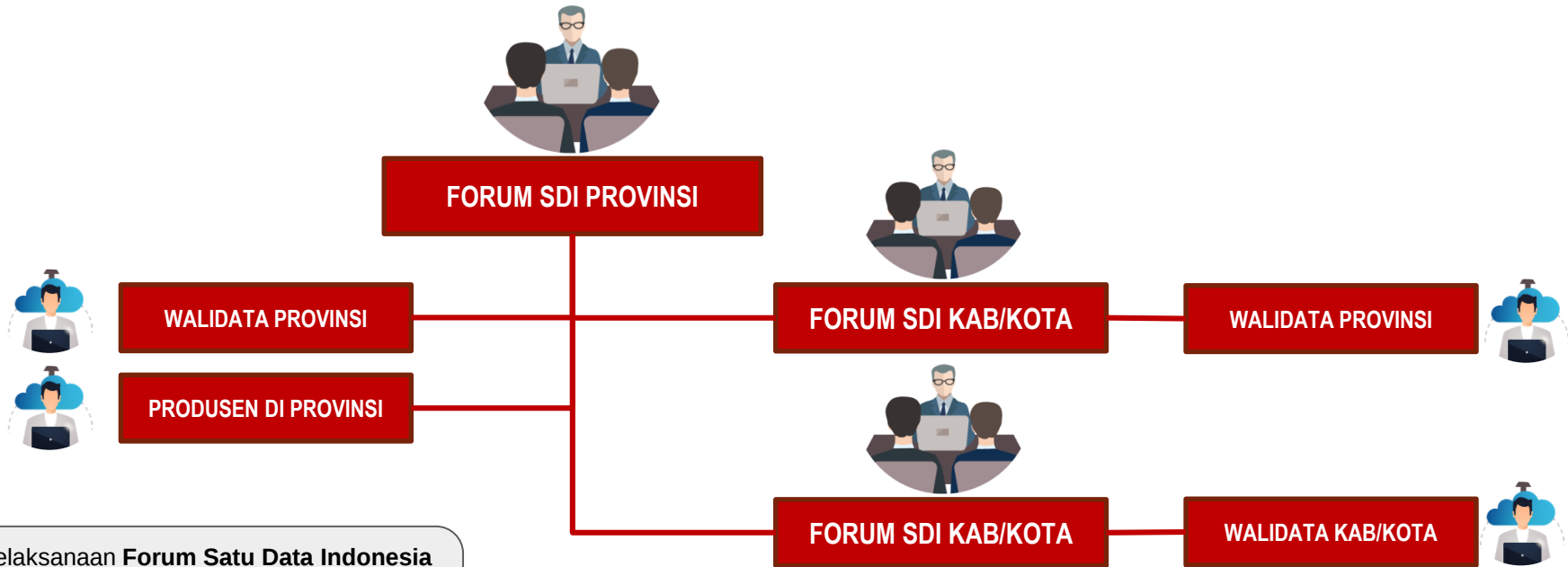
3

Forum Tindak Lanjut Daftar Data Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Melakukan koordinasi terhadap hasil Forum ke tingkat Kab/Kota	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Mendukung kegiatan teknis pengumpulan data

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi



Pelaksanaan **Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi** dapat melibatkan Walidata Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka upaya penguatan lembaga secara garis koordinasi vertikal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

Koordinasi horizontal antara Koordinator Forum SDI dan Walidata dan Produsen di daerah diperlukan untuk mendorong harmonisasi strategi-kebijakan dengan pelaksanaan teknis dan pemenuhan kebutuhan data.

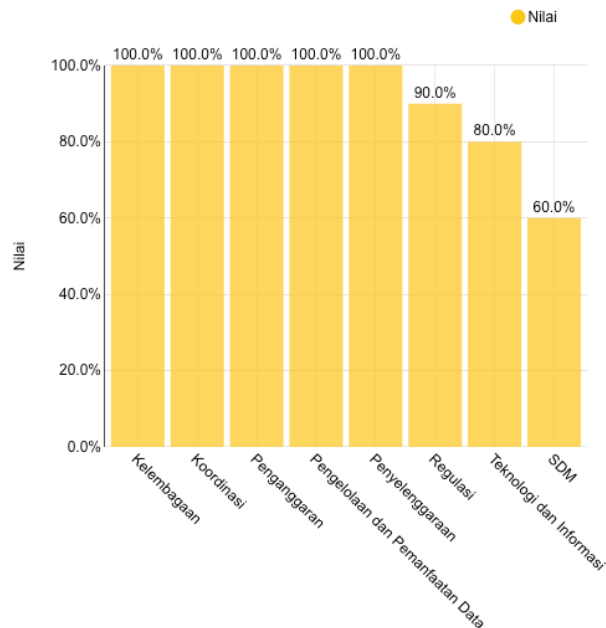
Koordinasi vertikal antara Koordinator Forum SDI dan Walidata dan Produsen diperlukan untuk percepatan penyelenggaraan SDI di Kab/Kota dibawahnya, dan penyelarasan kebijakan data antara Provinsi dan Kab/Kota

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat

Rata-rata Kesiapan SDI
Daerah



Kesiapan SDI Daerah (per Aspek):



Laporan **hasil pemantauan dan evaluasi mandiri** perkembangan penyelenggaraan SDI di Provinsi Jawa Barat telah dikirim melalui Surat Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat No. 07810/SA.01/SDI/PP.01.03 /05/2023 tanggal 9 Mei 2023 **tentang rekomendasi balikan pemantauan dan evaluasi mandiri penyelenggaraan SDI Tahun 2022.**

Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id



+62 822-6000-7040